



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019



2020

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2020

Inspektur Utama,

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 002

Budaya Organisasi



Religius

Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa



Akuntabilitas

Sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS



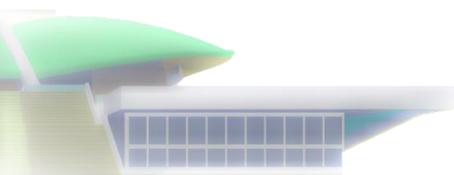
Profesional

Sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya



Integritas

Totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan, dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 serta umpan balik perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Selain itu juga, laporan kinerja ini merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun Anggaran 2019 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Setjen dan BK DPR RI merupakan unsur pendukung DPR RI yang terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3. Pembentukan organisasi Setjen dan BK DPR RI sendiri ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018. Perubahan Struktur organisasi di Setjen dan BK DPR RI bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan DPR RI.

Perubahan struktur memerlukan penataan kembali baik dari bidang tatalaksana, sumber daya manusia (SDM), maupun infrastruktur pendukungnya. Dalam bidang tatalaksana perlu dilakukan penyesuaian peta proses bisnis dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam aspek SDM diperlukan dukungan pegawai yang berkualitas dengan jumlah yang memadai. Sedangkan dalam aspek infrastruktur, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan DPR RI yang semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai perwujudan dari Akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Setjen DPR RI	67,5	80,27	118,9 %
2.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	N/A	N/A
3.	Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
		2. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	70 % (941 pegawai)	53,9 % (723 pegawai)	76,9%
5.	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi	Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan teknologi informasi	67,5 %	90,23 %	133,6 %
6.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Badan Keahlian	67,5	80,23 %	118,8 %

Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016-2019 adalah meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal, dan meningkatkan kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal. Namun dengan adanya perubahan struktur organisasi, diharapkan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai yaitu mewujudkan Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Hasil capaian kinerja dari sasaran yang di tetapkan telah memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, namun untuk perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Menetapkan target kinerja pada indikator terkait pengukuran kepuasan Anggota DPR RI berdasarkan hasil penghitungan tahun sebelumnya.
2. Menetapkan indikator kinerja yang berorientasi pada *outcome*.
3. Melakukan pembaruan terhadap Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen dan BK DPR RI tahun 2020-2024 sebagai Road Map rencana pengembangan TIK Setjen dan BK DPR RI.
4. Merumuskan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan terhadap 16 pernyataan atas 6 KPA dalam 3 elemen yang memerlukan perbaikan / *Areas of Improvement* (Aoi) yang telah ditetapkan untuk menuju "Level 3 Penuh" pada indikator tingkat kapabilitas APIP.
5. Meningkatkan kesesuaian proses penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP terhadap Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP pada indikator tingkat maturitas SPIP.

PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas penggunaan anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penataan organisasi Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015 merupakan perubahan yang sangat besar dan mendasar. Pada tahun 2018, Setjen dan BK DPR RI telah melewati masa transisi dengan melakukan penataan organisasi, jabatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarannya. Hal ini juga merupakan awal baru

periode perencanaan strategis dengan ditetapkannya Renstra Setjen dan BK DPR RI periode 2016-2019. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Renstra dimaksud, Setjen dan BK DPR RI telah melakukan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja agar lebih tepat dengan organisasi Setjen dan BK DPR RI serta diharapkan kinerja organisasi dapat lebih terukur.

Dengan segala dinamika yang ada, Setjen dan BK DPR RI beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Pencapaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja setjen dan BK DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI serta sebagai media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa datang. Atas peran serta seluruh jajaran pegawai Setjen dan BK DPR RI yang berkomitmen dan berdedikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta jabatannya, kami ucapkan terima kasih.

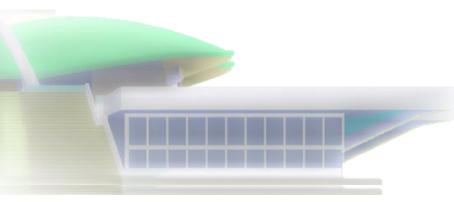
Jakarta, 26 Februari 2020
Sekretaris Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Iskandar'.

Indra Iskandar
NIP. 196611141997031001

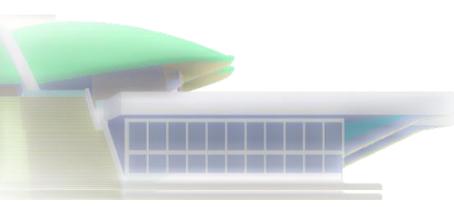
DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR PENGHARGAAN	xii
TIM PENYUSUN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	5
1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Akuntabilitas Keuangan	49
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Rekomendasi	63
LAMPIRAN	65
A. Lampiran 1	67
B. Lampiran 2	69
C. Lampiran 3	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	6
Gambar 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Gambar 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	8
Gambar 4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Setjen dan BK DPR RI	11
Gambar 5	Kegiatan Persidangan	21
Gambar 6	Kegiatan Diplomasi Parlemen	22
Gambar 7	Penilaian ISO 9001-2015 Bagian Layanan Kesehatan	23
Gambar 8	Sistem Informasi Legislasi	24
Gambar 9	Layanan Pengamanan	25
Gambar 10	Foto Loket Pusat Pelayanan Pengaduan Biro BMN	25
Gambar 11	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	30
Gambar 12	Hasil <i>Assessment</i> BPKP Tahun 2019	32
Gambar 13	Foto Pelaksanaan Diklat Tahun 2019	40
Gambar 14	Aplikasi Mobile	43
Gambar 15	Produk Layanan Keahlian	48
Gambar 16	Prosentase Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2019	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matriks Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Tahun 2019	14
Tabel 3	Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019	17
Tabel 4	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Setjen DPR RI	20
Tabel 5	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Penggunaan Layanan oleh Setjen DPR RI Tahun 2018 dan Tahun 2019	26
Tabel 6	Perbandingan Capaian Kinerja Setjen DPR RI Terhadap Dukungan Layanan Tahun 2018 dan Tahun 2019	26
Tabel 7	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	27
Tabel 8	Persandingan Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2019	31
Tabel 9	Rincian Hasil Penilaian Maturitas Unsur SPIP	34
Tabel 10	Perbandingan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Tahun 2018 dan Tahun 2019	35
Tabel 11	Matriks Perbandingan Target Maturitas SPIP Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019	36
Tabel 12	Persentase Kepuasan Pengguna Terhadap Dukungan Teknologi Informasi	42
Tabel 13	Daftar Aplikasi/Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan pada Tahun 2019	43
Tabel 14	Perbandingan Unsur Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017 - 2019	47
Tabel 15	Perbandingan Capaian Kinerja Badan Keahlian DPR RI Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019	48
Tabel 16	Persandingan Pagu Anggaran DPR RI Tahun 2018 dan 2019	49
Tabel 17	Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2019	50

Tabel 18	Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2016 - 2019	51
Tabel 19	Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019	52
Tabel 20	Capaian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Persidangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian	53
Tabel 21	Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019	54
Tabel 22	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran	56
Tabel 23	Rincian Realisasi Anggaran per Unit Kerja dan Kaitannya dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	57
Tabel 24	Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019	61

DAFTAR PENGHARGAAN



Sekretaris Jenderal DPR RI menerima penghargaan raihan Opini WTP atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018

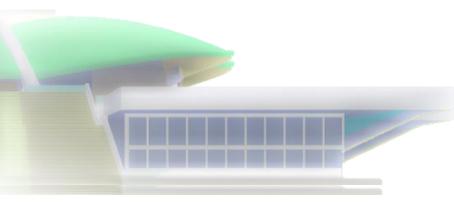
Bronze Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019 kategori Government PR Sub Kategori Lembaga dengan menyajikan kegiatan Edukasi Parlemen sebagai Program PR Unggulan



Stand Terfavorit Legislative Sulut Go Expo 2019 dengan dua kriteria penilaian yakni Jumlah pengunjung terbanyak dan Desain paling kreatif dan menarik

Stand Terinovatif pada Pameran yang diselenggarakan oleh Kemkominfo dalam rangka AMH (Anugrah Media Humas) 23-25 Oktober 2019





TIM PENYUSUN

PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si
Dra. Damayanti, M.Si
Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB

Rahmad Budiadji, S.IP, M.Si
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

KETUA

Koko Surya Dharma, A.K.S, M.Si.

WAKIL KETUA

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

SEKRETARIS

Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.

ANGGOTA

Drs. Budi Jatnika, M.Si
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si
Dwi Fihartomo, SH, MH
Endang Suryastuti, SH, M.Si
Andri Suryanta, S.IP
Abdul Rahman, S.IP
Sri Murti Nardani, SE
Dwi Widayanti, S.IP
Husnul Latifah, S.Sos
Agus Panuhun, S.Sos
Dedy Bagus Prakasa, SE, M.Ak
Timbang Supriyanto, S.Sos

Maryanto, S.A.P
Sutrisno, SE
Puji Lestari, SE
Parid, SE
Ade Effendi, S.Sos
Haryanti, S.A.B, M.A.P
Dedi, S.Sos
Effie, S.Sos, M.A.P
Poeji Poerwanti, SH, MH
Kiki Zakiah, SE, M.A.P
Efendi, S.Sos, M.A.P
Dr. Laily Fitriani, SH, MH
Dwi Nartami Setyorini, SE
Venti Eka Satya, SE, M.Si, Ak
Denny Ramadon, SE
Intan Pujakesuma, SE, M.A.P
Hakhimah, S.Sos
Santy Yulfiani Girsang, SE
Kusdinar
Ahmad Yani Hari Nugroho, SH
Siti Rahmawati, SE
Tata

1

Pendahuluan

Gambaran Umum

Dasar hukum

Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi

Permasalahan Utama



Bab I

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya, Setjen dan BK DPR RI menyelenggarakan sistem dukungan teknis administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR RI. Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Setjen dan BK DPR RI berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional sesuai dengan mekanisme berdasarkan prinsip *good governance*. Salah satu prinsip yang dipersyaratkan adalah akuntabilitas, yang bermakna instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sementara substansi Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya. Penyusunan laporan kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian

program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Setjen dan BK DPR RI mengelola anggaran DPR RI yang terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Pada Tahun 2019, Setjen dan BK DPR RI mengelola total anggaran DPR RI sebesar Rp.5.739.310.147.000,00, dengan rincian Satker Setjen sebesar Rp. 1.930.278.774.000,00 dan Satker Dewan sebesar Rp. 3.809.031.373.000,00.

Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pengelola Anggaran Satker Dewan mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan serta memberikan dukungan hak keuangan Dewan. Dengan kewenangan tersebut, maka kewajiban perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal DPR RI. Akan tetapi penunjukan Sekjen DPR RI selaku pengguna anggaran DPR RI mempunyai batasan-batasan, seperti mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran, penetapan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR, penyusunan rencana kerja dan program, serta pengawasan pengelolaan anggaran DPR RI oleh Sekjen DPR RI. Sehingga secara umum Sekjen DPR RI tidak dapat mengatur seluruh pengelolaan anggaran DPR RI tanpa melalui persetujuan Alat Kelengkapan DPR RI melalui BURT.

Penyusunan Laporan Kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun anggaran 2019 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Setjen dan BK DPR RI ini disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).

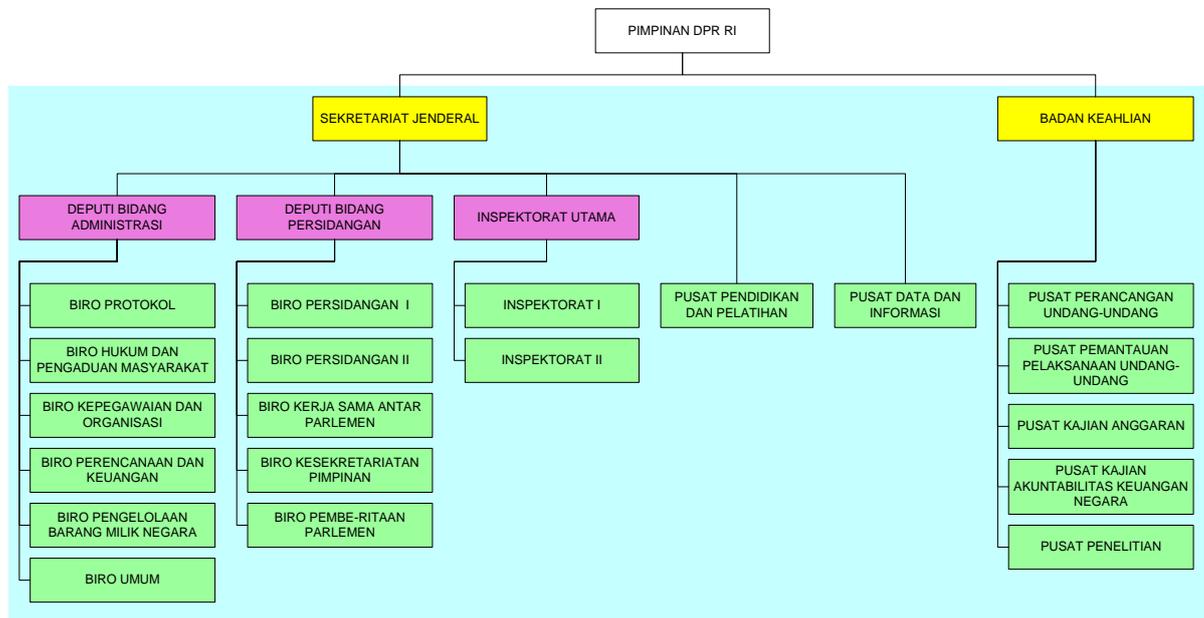
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Memenuhi amanat UU MD₃, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung DPR RI telah melaksanakan restrukturisasi organisasi menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada akhir tahun 2015. Hal ini menggambarkan fokus pembagian fungsi dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat teknis, administratif, dan keahlian. Fungsi dukungan teknis administrasi dan persidangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan dukungan fungsi keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Keberadaan organisasi Setjen dan BK DPR RI ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018. Struktur organisasi Setjen dan BK DPR RI secara keseluruhan tertuang dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.
 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2020

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Tahun 2019 ini merupakan tahun keempat setelah pelaksanaan restrukturisasi organisasi sisempendukung DPR RI menjadi Setjen dan BK DPR RI serta tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Setjen dan BK DPR RI Periode 2016-2019. Pada tahun ini beberapa penyesuaian serta penataan baik dari sisi ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur telah dilakukan. Adapun langkah strategis yang ditempuh Setjen dan BK DPR RI dalam menghadapi permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Sebagai organisasi yang mendukung kinerja parlemen, keunikan bentuk organisasi Setjen dan BK DPR RI menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan peta proses bisnis Setjen dan BK DPR RI. Peta proses bisnis Setjen dan BK DPR RI telah dilakukan sejak tahun 2016, namun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Setjen dan BK DPR RI telah melakukan penyesuaian kembali terhadap peta proses bisnis organisasi secara bertahap sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan SOP pada semua tingkatan unit organisasi. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Keputusan

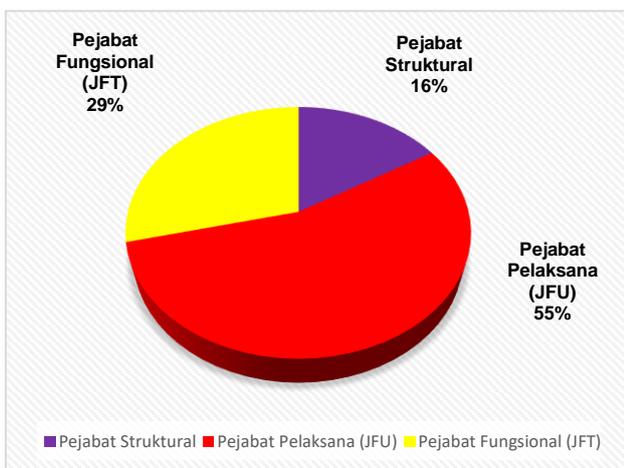
Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1724/SEKJEN/2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penataan jabatan yang disertai dengan penataan sumber daya manusia sebagai dampak perubahan struktur organisasi Setjen dan BK telah selesai dilaksanakan pada tahun 2018. Tantangan yang dihadapi pada tahun ini adalah keharusan untuk menyesuaikan manajemen sumber daya manusia di Setjen dan BK DPR RI dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, adanya peluang penataan manajemen kepegawaian dalam Undang-Undang MD₃ dan tantangan penataan manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dalam Undang-Undang ASN menuntut Setjen dan BK DPR RI untuk membentuk manajemen yang paling sesuai untuk diterapkan di Setjen dan BK DPR RI.

Berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil dari Bagian Kepegawaian pada bulan Januari 2020, jumlah pegawai Setjen dan BK DPR RI sebanyak 1388 orang yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 225 orang, pejabat fungsional sebanyak 400 orang, dan pejabat pelaksana sebanyak 763 orang, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



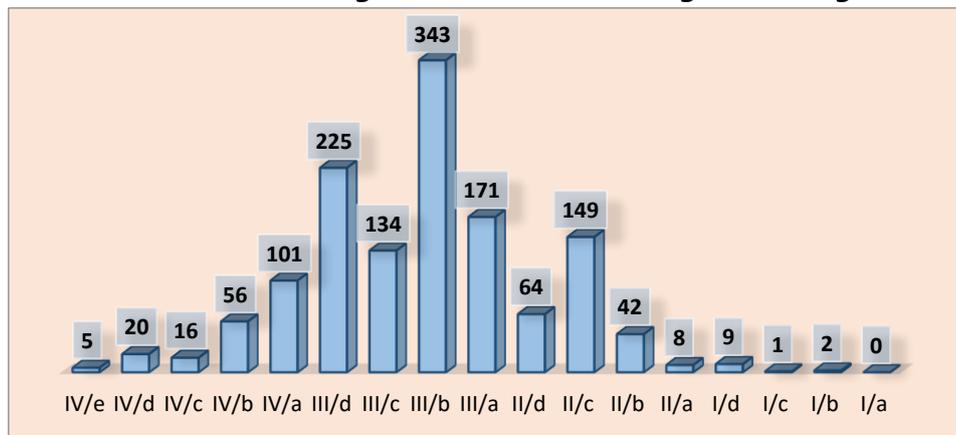
Sumber: Bagian Kepegawaian, Januari 2020

Dari Gambar 2 dapat disampaikan bahwa jumlah terbanyak adalah pegawai dengan pejabat pelaksana sebesar 55%, sedangkan jumlah terkecil adalah pejabat struktural sebesar 16 %. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebesar 29%. Jika dilihat dari analisa beban kerja (ABK) yang telah disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, maka masih perlu penambahan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional.

Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan SDM harus didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja, maka ke depannya masih diperlukan penambahan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Saat ini, jumlah PNS yang menduduki jabatan administrasi masih lebih banyak dari jabatan fungsional. Berikut ini jumlah pegawai Setjen dan BK DPR RI dapat dirinci berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana gambar 3.

Gambar 3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber: Bagian Kepegawaian, Januari 2020

Dari Gambar 3 dapat disampaikan bahwa jumlah terbanyak adalah pegawai dengan golongan III/b sebanyak 343 orang dan golongan III/d sebanyak 225 orang. Sehubungan dengan hal itu, terlihat bahwa jumlah pegawai dalam jabatan pelaksana yang menduduki golongan III/b cukup tinggi sehingga memungkinkan bagi jabatan pelaksana tersebut untuk alih jabatan ke jabatan fungsional sehingga pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional yang diharapkan dapat terpenuhi. Permasalahan lain di bidang SDM adalah kebutuhan tenaga teknis administrasi untuk jabatan pelaksana pada level pendidikan setingkat SLTA.

3. Infrastruktur

Adanya penambahan jumlah Anggota DPR RI Periode 2019-2024 sebanyak 15 (lima belas) orang, menuntut penambahan sarana dan prasarana seperti ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun memerlukan ketersediaan ruang yang memadai. Kendala utama dalam proses pengadaan sarana dan prasarana adalah belum adanya standar sarana dan prasarana serta standar kebutuhan. Hal ini akan mempengaruhi penyediaan fasilitas pendukung.



2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi. Arah kebijakan Setjen dan BK DPR RI telah tertuang dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI tahun 2016-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Kepsekjen) Nomor 539/SEKJEN/2016. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setjen dan BK DPR RI dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Setjen dan BK DPR RI



Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2020

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI menetapkan dua program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.

Adapun target indikator kinerja pada kedua program tersebut di atas digunakan untuk menyusun Renstra Setjen dan BK DPR RI periode 2016-2019. Penentuan Indikator Kinerja merupakan proses pembelajaran yang berkesinambungan (*continous learning*) sehingga setiap tahun selama kurun periode tertentu senantiasa dilakukan perbaikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) merupakan mitra kerja Setjen dan BK DPR RI dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa masukan, koreksi, dan penilaian yang disampaikan oleh KemenPAN dan RB menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dan tindaklanjuti sehingga perubahan Indikator Kinerja yang ada tidak lepas dari peran KemenPAN dan RB.

Pada tahun 2016 merupakan tahun awal untuk merespon adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Hal tersebut tampak jelas dalam penentuan sasaran organisasi. KemenPAN dan RB memberikan masukan terhadap Setjen dan BK DPR RI yaitu bagaimana Setjen dan BK DPR RI mengedepankan keunikan dari organisasi tersebut sebagai nilai jual (*selling point*) sehingga munculah dua sasaran dan enam indikator kinerja.

Di dalam perkembangannya, ternyata salah satu keunggulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah akuntabilitas dimana salah satu fungsi akuntabilitas adalah untuk mengukur bagaimana setiap sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga (K/L) mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Sebagai gambaran dalam menonjolkan cerminan atas kualitas akuntabilitas di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, maka dibentuklah dua sasaran baru dan lima Indikator Kinerja. Sehingga pada tahun 2017-2018, Setjen dan BK DPR RI telah memiliki empat sasaran dan sebelas Indikator Kinerja. Gambaran perkembangan Sasaran dan Indikator Kinerja dari tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Matriks Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI
		Persentase penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan upacara	Persentase penyelenggaraan upacara

No	Sasaran	Indikator Kinerja		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP	kenegaraan yang sesuai dengan SOP	kenegaraan yang sesuai dengan SOP
		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT	Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT	Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT
		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM
2.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI
		Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan
3.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien		Indeks RB	Indeks RB
4.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi		Opini BPK	Opini BPK
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2020

Pada saat menguraikan (*cascading*) Indikator Kinerja terhadap kinerja unit organisasi, memang agak sedikit mengalami kesulitan karena dari Indikator Kinerja yang ada, beberapa indikator memiliki metode penghitungan yang kurang terukur sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan inkonsisten. Pada tahun 2019, telah dilakukan kembali penyesuaian atas Sasaran dan Indikator Kinerja dengan alasan kesederhanaan adalah kekuatan (*simplicity is a power*). Setelah dilakukan upaya merangkai dan menyusun berbagai skenario yang ada, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Sasaran dan Indikator Kinerja harus ringkas, mudah dihitung, dan berkesinambungan. Penyesuaian Indikator Kinerja pada tahun 2019 menghasilkan enam Sasaran dan tujuh Indikator Kinerja. Enam sasaran yang ada merupakan acuan bagi unit kerja yang ada di bawahnya sehingga saat dilakukan *cascading* tampak jelas dan selaras.

Selanjutnya, metode penghitungan enam dari tujuh Indikator Kinerja menggunakan metode yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu dengan metode survei dan penilaian oleh KemenPAN dan RB serta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Satu Indikator Kinerja dinilai oleh pihak internal dengan metode penghitungan tersendiri. Sehubungan dengan perubahan tersebut diatas, diharapkan Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada dapat selaras dan berkesinambungan.

Pada penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat perubahan mendasar yang diambil dalam perumusan sasaran dan indikator kinerja, antara lain:

1. Perubahan indikator kinerja terkait dukungan persidangan diubah menjadi indeks kepuasan Anggota DPR terhadap dukungan layanan Setjen DPR RI yang perhitungannya dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI;
2. Perubahan indikator kinerja terkait pengawasan berupa pengurangan indikator "Opini BPK" dan "Nilai Akuntabilitas Kinerja";
3. Penambahan sasaran "Meningkatnya kualitas pengembangan SDM" dengan indikator kinerja "Persentase pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan".
4. Penambahan sasaran "Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi" dengan indikator "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Teknologi Informasi".

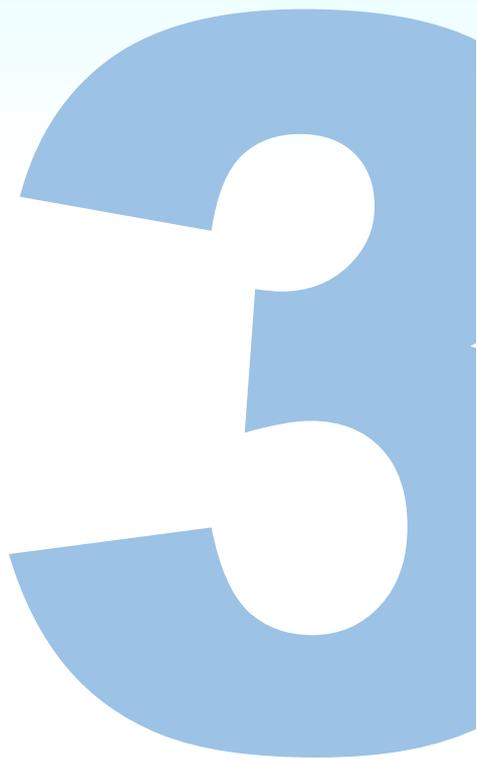
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Tahun 2019

No	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan administrasi dan persidangan	67,5
2.	Terwujudnya organisasi Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
3.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
4.	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	70 %
5	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi	Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Teknologi Informasi	67,5 %
6.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Badan Keahlian	67,5

Sumber: Bagian Perencanaan, Februari 2019



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Keuangan



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.
Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persidangan kepada DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan administrasi dan persidangan	67,5	80,27	118,9%
2.	Terwujudnya organisasi Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	N/A	N/A
3.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		2. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	70% (941 pegawai)	53,79% (723 pegawai)	76,9%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi	Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Teknologi Informasi	67,5%	90,23%	133,6%
6.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Badan Keahlian	67,5	80,23	118,8 %

Penjelasan atas capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran

1

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persidangan kepada DPR RI yang optimal

Indikator

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan administrasi dan persidangan

Target

67,5

Realisasi

80,27

Capaian

118,9 %

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Permenpan RB tersebut, maka Setjen dan BK DPR RI melakukan survei kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPR RI dengan

menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB tersebut. Survei dilakukan sebagai salah satu bentuk hasil evaluasi atas kinerja Setjen dan BK DPR RI dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada Anggota DPR RI.

Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei (kuesioner) berdasarkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercantum pada Lampiran I Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan yang diselenggarakan oleh Setjen dan BK DPRI RI serta data yang ingin diperoleh dari jenis layanan yang diselenggarakan. Pada survei ini jenis layanan yang akan dilakukan pengukuran yaitu :

- a. Layanan Persidangan;
- b. Layanan Diplomasi Parlemen;
- c. Layanan Keprotokolan;
- d. Layanan Administrasi Keuangan dan Perjalanan Dinas;
- e. Layanan Kesehatan;
- f. Layanan Teknologi dan Informasi; dan
- g. Layanan Pengamanan Gedung DPR RI

Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu :

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
2. Waktu Penyelesaian
3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
4. Kompetensi dan Perilaku Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
6. Sarana dan Prasarana

Hasil survei Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Setjen DPR RI tergambar dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Nilai Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Setjen DPR RI

No.	Unsur Survei Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	85,12
2.	Waktu Penyelesaian	82,23
3.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	81,21
4.	Kompetensi dan Perilaku SDM	84,42

No.	Unsur Survei Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	76,98
6.	Sarana dan Prasarana	74,26
Indeks Komposit		80,27

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa hasil survei Nilai Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Setjen DPR RI untuk tahun 2019 memperoleh skors 80,27. Dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 67,5, maka capaian kinerja IKU "Nilai Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Setjen DPR RI" sebesar 118,9%.

Realisasi yang diperoleh tersebut jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 67,50. Hal tersebut merupakan buah dari perbaikan keberlanjutan (*continuous improvement*) yang dilakukan oleh Setjen DPR RI. Setiap masukan dari Anggota DPR RI senantiasa menjadi pendorong (*trigger*) untuk memperbaiki pelayanan. Adapun kepuasan tersebut telah dicapai karena Setjen DPR RI telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Layanan Persidangan

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan persidangan oleh Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan :

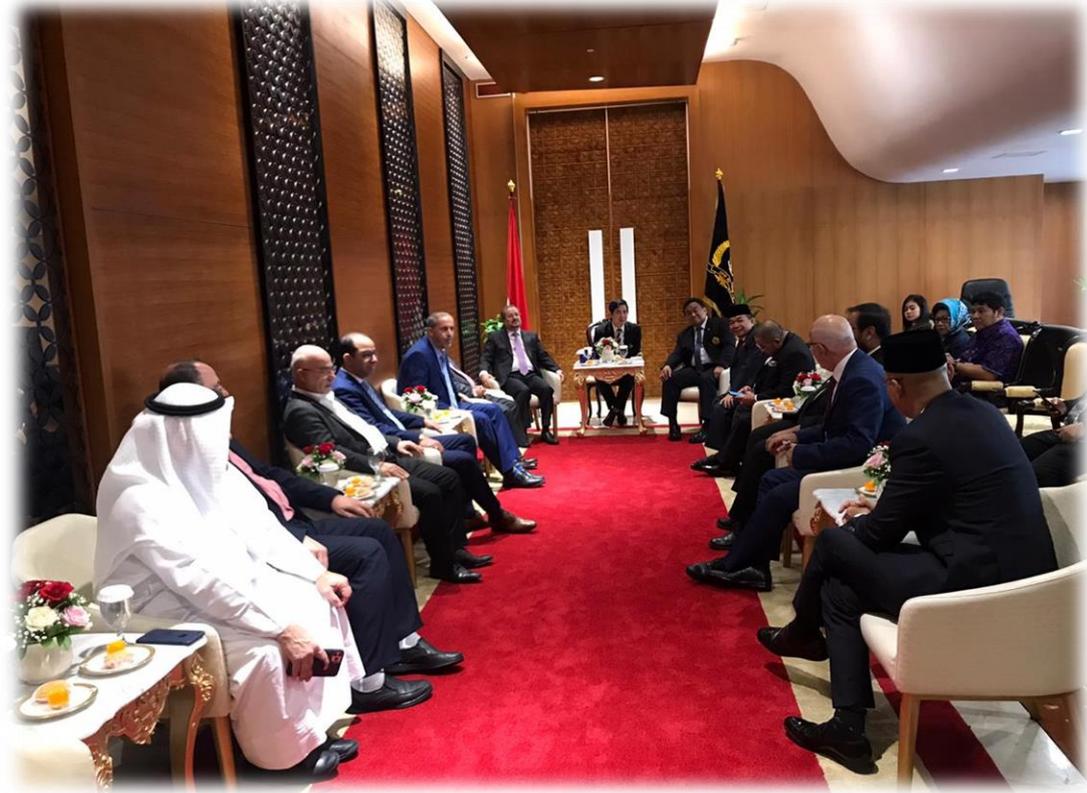
1. menggunakan sistem *cloud* sebagai sarana penyimpanan (*database*) bahan rapat, dan laporan singkat.
2. melakukan komunikasi yang lebih intens kepada Anggota Dewan melalui penggunaan *sms gateway*, *WhatsApps* Group, media elektronik atau media komunikasi untuk penyampaian undangan rapat, bahan rapat, dan laporan singkat. Selain lebih cepat, penggunaan teknologi tersebut juga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Gambar 5.
Kegiatan Persidangan



b. Layanan Diplomasi Parlemen

- Layanan Diplomasi Parlemen meliputi pelayanan penterjemahan pada pertemuan-pertemuan baik bilateral, regional maupun internasional, penterjemahan dokumen-dokumen, penjajakan kepada Parlemen negara sahabat, dukungan penyiapan draft intervensi dan resolusi pada sidang internasional, dan MoU dengan negara sahabat.
- Membuat system perjalanan Luar Negeri Anggota Dewan.
- Digitalisasi bahan-bahan rapat untuk Anggota Dewan.
- Membentuk kesekretariatan Open Parlemen dalam rangka mendukung kegiatan Open Parlemen Indonesia.
- Mendukung kegiatan *Global Organization Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) dengan menjadi sekretariat Head Office GOPAC di Jakarta.



Gambar 6.
Kegiatan Diplomasi
Parlemen



c. **Layanan Keprotokolan**

- Perluasan layanan keprotokolan bandara

Peningkatan layanan keprotokolan bandara ditunjukkan melalui penambahan cakupan bandara yang terlayani. Semula layanan keprotokolan bandara hanya di kota-kota besar saja, namun kini sudah mulai mencakup kota-kota berkategori sedang. Hingga akhir tahun 2019, semula ada 16 bandara, kini sudah 19 bandara yang dapat melayani layanan keprotokolan.

d. **Layanan Administrasi Keuangan dan Perjalanan Dinas**

- Integrasi sistem informasi keuangan

Sistem informasi keuangan yang dimiliki oleh Setjen DPR RI mulai diintegrasikan untuk memudahkan pelayanan serta menyediakan data yang terkini bagi Anggota DPR RI dalam menggunakan layanan administrasi keuangan dan perjalanan dinas. Beberapa aplikasi yang dapat dioptimalkan antara lain aplikasi ALADIN, SIGAT, dan MANTUL.

e. **Layanan Kesehatan**

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan

Fasilitas penunjang kesehatan di Bagian Layanan Kesehatan terus ditingkatkan sebagai bagian dari pelayanan prima bagi Anggota DPR RI. Peralatan yang dilengkapi di tahun 2019, antara lain Non Contact Tonometer, Slit Lamp, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan yang diberikan, pada tahun 2019 Bagian Yankes mengikuti proses sertifikasi ISO 9001:2015 yang dimulai pada bulan April. Dan pada tanggal 6 November 2019 Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen dan BK DPR RI telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015.



Gambar 7.
Penilaian ISO 9001 – 2015
Bagian Pelayanan Kesehatan



f. Layanan Teknologi dan Informasi

- Penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat diakses antara lain Layanan Internet, Email DPR, Cloud DPR, dan Blog Anggota. Kanal akses terhadap informasi diberikan melalui layanan teknologi informasi yang berupa website atau aplikasi yang dapat diakses oleh Anggota Dewan dan masyarakat secara daring. Aplikasi yang dapat diakses oleh Anggota, TA/SA, Masyarakat, antara lain:
 - Website DPR
 - SIPERPUS
 - SiAR
 - SILEG
 - Website BKSAP Diplomasi Parlemen
 - Website Pusat PUU
 - Website Pusat Panlak UU
 - Website Pusat Kajian AKN
 - Website Pusat Kajian Anggaran
 - Website Pusat Penelitian

Gambar 8. Sistem Informasi Legislasi



No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update	Prolegnas 2020-2024
1		RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	18 Feb 2020	Terdaftar 248
2		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	18 Feb 2020	Penyusunan 0
3		RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	18 Feb 2020	Harmonisasi 0
4		RUU tentang Keamanan Laut	DPR	18 Feb 2020	Penetapan Usul 0
					Pembahasan 0
					Keputusan 0
					Selesai 0

g. **Layanan Pengamanan Gedung DPR RI**

Dalam upaya meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi Anggota DPR RI, Pegawai dan seluruh *stakeholder* yang melakukan aktifitas di Gedung Perkantoran DPR RI telah dilakukan penambahan fasilitas pengamanan dalam di lingkungan Gedung DPR RI agar tercapai standar pengamanan objek vital, meliputi:

1. penambahan peralatan *Security System* seperti *X Ray*, *Stand-Off Concealed Threat Detection*, *Walkthrough Metaldetector (WTMD)*, transformasi CCTV dari analog menjadi digital, penerapan *acces management*, dan penggunaan anjing Pelacak (K-g).
2. peningkatan kualitas personil pengamanan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan personil antara lain dengan Pembangunan Karakter Personil, Pengenalan Bahan Peledak (Handak), tata cara pemeriksaan kendaraan, dan pelatihan beladiri (karate).



Gambar 9.
Layanan Pengamanan

h. **Layanan dukungan sarana dan prasarana**

Guna peningkatan percepatan penanganan pengaduan terkait sarana dan prasarana yang berada di kompleks perkantoran Gedung DPR RI, Rumah Jabatan Anggota di RJA Kalibata dan Ulujami, Wisma DPR RI Kopo maupun untuk pengaduan layanan Administrasi BMN, telah dibangun Pusat Pelayanan Pengaduan berupa Program Aplikasi *Call Centre System* yang berbasis *online intern* dengan jaringan *Local Area Network (LAN)* dengan nomor kontak 135, atau dapat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Biro Pengelolaan BMN ataupun datang langsung ke loket pelayanan pengaduan BMN yang berada di lantai 1 Gedung mekanik.



Gambar 10. Foto Loket Pusat Pelayanan Biro BMN

Perbandingan hasil survei kepuasan penggunaan layanan oleh Setjen DPR RI tahun ini bila dibandingkan dengan tahun lalu dapat tergambar dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Perbandingan hasil Survei Kepuasan Penggunaan Layanan oleh Setjen DPR RI Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Unsur Survei Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan	
		2018	2019
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	83,66	85,12
2.	Waktu Penyelesaian	83,14	82,23
3.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	83,09	81,21
4.	Kompetensi dan Perilaku SDM	84,07	84,42
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	79,93	76,98
6.	Sarana dan Prasarana	77,96	74,26
Indeks Komposit		82,04	80,27

Sumber: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata indeks unsur survei kepuasan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu namun penurunan ini tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa keluhan dari Anggota Dewan mengenai ruang kerja Anggota DPR RI yang sudah tidak nyaman dan perlunya peremajaan beberapa ARTK. Permasalahan mengenai kenyamanan dan kapasitas ruang kerja ini diperkirakan akan terus muncul sepanjang gedung baru DPR RI belum dibangun. Selain itu, Rumah Jabatan Anggota (RJA) juga mendapat sorotan, diantaranya respon terhadap keluhan perlu di tingkatkan, kualitas RJA yang perlu diperbaharui dan CCTV pengamanan di sekitar RJA perlu ditinjau kembali sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan RJA. Setjen DPR RI telah melakukan upaya perbaikan atas keluhan Anggota Dewan meskipun dilakukan secara bertahap.

Target, realisasi, serta capaian kinerja kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Setjen DPR RI tahun ini juga mengalami penurunan biarpun tidak terlalu signifikan bila dibandingkan tahun lalu sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Perbandingan Capaian Kinerja Setjen DPR RI Terhadap Dukungan Layanan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan	Tahun	
	2018	2019
Target	65	67,5
Realisasi	82,04	80,27
Capaian	126,21 %	118,9 %

Sasaran

2

Terwujudnya organisasi
Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI yang efektif
dan efisien

Indikator

Nilai Reformasi Birokrasi

Target

B

Capaian

N/A

Realisasi

N/A

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 telah dilaporkan oleh Setjen dan BK DPR RI kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan September 2019 namun sampai dengan laporan kinerja ini selesai disusun, hasil penilaian akhir tahun 2019 tersebut belum dapat disampaikan sehingga belum dapat dihitung realisasi dan capaiannya.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2018 telah diperoleh nilai 72,71 atau kategori BB, dengan rincian sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
A	Pengungkit			
	1. Manajemen Perubahan	5,00	4,11	4,14
	2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,34	3,44
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,84
	4. Penataan Tata Laksana	5,00	3,60	3,38
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,23	13,25
	6. Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,76	2,77
	7. Penguatan Pengawasan	12,00	6,81	7,20
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,67	4,04
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	41,36	42,06

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
B	Hasil			
	1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	11,42	12,87
	2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,62	9,23
	3. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,55	8,55
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	29,69	30,65
	Indeks RB	100,00	71,05	72,71

Sumber: Setjen dan BK DPR RI, 2019

Indeks Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI mengalami kenaikan walaupun belum terlalu signifikan. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen Setjen dan BK DPR RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, sebagai berikut :

1. Penerapan perbaikan rekrutmen CPNS tahun 2018, seleksi terbuka untuk pengisian JPT, assessment terhadap pegawai secara bertahap, dan peningkatan kualitas SDM dengan pelaksanaan pengembangan karir dan pengembangan potensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik keterampilan maupun keahlian.
2. Menetapkan nilai organisasi yaitu Religious, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI) sebagai bagian yang mewarnai nilai dan perilaku pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setjen dan DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
3. Peningkatan penggunaan IT untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi serta menggunakan 72 aplikasi berbasis IT khususnya pada seluruh unit Eselon I.
4. Membangun system pelayanan satu atap untuk peningkatan pemberian pelayanan kepada Anggota Dewan dan pelayanan lainnya.
5. Telah menyusun norma, pedoman dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) maupun Proses Bisnis (Probis).
6. Telah memiliki dan melaksanakan pelayanan berdasarkan 109 SOP, salah satunya SOP Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Humas.
7. Mengimplementasikan penguatan pengawasan antara lain penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat dan *whistle-blowing system*, serta penanganan benturan kepentingan.

Sasaran

3

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Indikator 3.1

Tingkat Kapabilitas APIP

Target

Level 3

Realisasi

Level 3

Capaian

100%

Sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat oleh Inspektorat Utama dalam upaya meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan target RPJMN 2015-2019 yaitu Penguatan Tata Kelola Pengawasan yang salah satu Kebijakan Pengawasan Inspektorat Tahun 2017 yaitu Penguatan Tata Kelola Pengawasan yang salah satunya melalui peningkatan Level *Internal Audit Capability Model* (IACM), telah dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI). Dalam pelaksanaan penilaian terhadap kapabilitas APIP dilakukan Bimbingan Teknis oleh BPKP RI, baik dari input data sampai dengan submit.

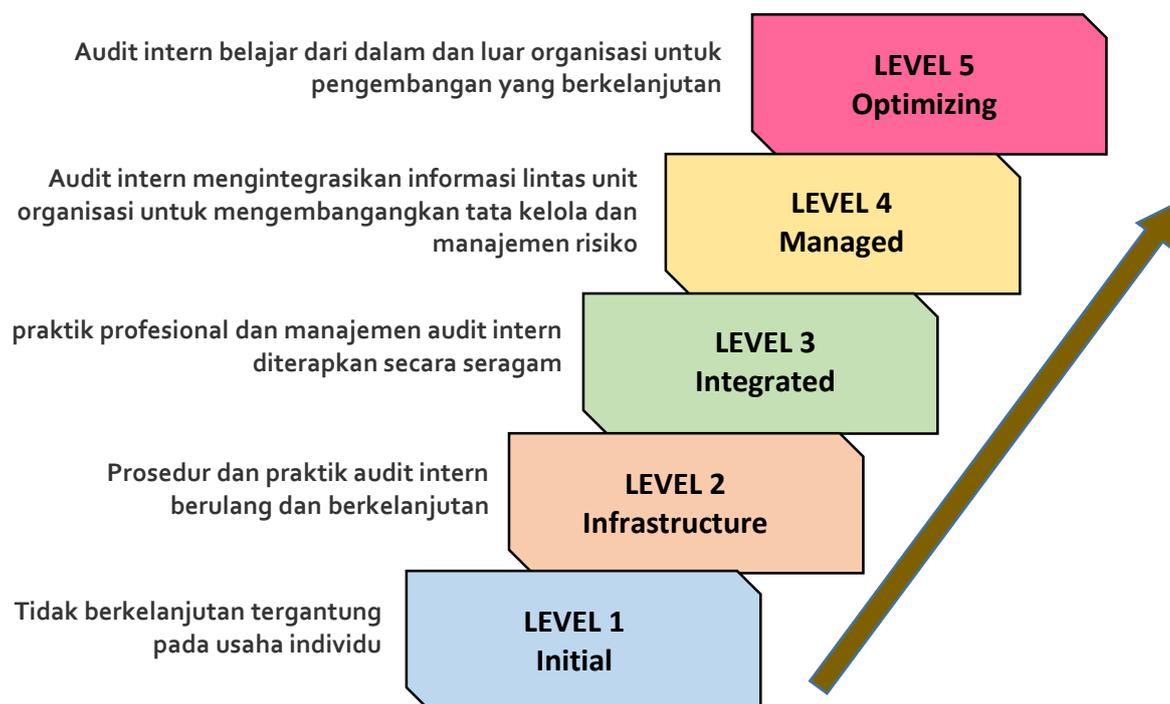
Terkait dengan hal tersebut diperlukan unit pengawasan internal yang efektif yang sekurang-kurangnya mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina SPIP telah menyusun Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang dapat digunakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota membangun kapabilitas APIP-nya agar dapat melaksanakan pengawasan intern secara efektif. Kapabilitas Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal ditentukan melalui pengukuran *Internal Audit Capability Model (IACM)*. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif. Level terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya sebagaimana tergambar dalam Gambar 10.

Gambar 11.
Level *Internal Audit Capability Model (IACM)*



Aktivitas audit intern memiliki enam elemen utama, yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Area-area proses kunci aktivitas audit intern tiap level dalam IACM berkaitan erat dengan ke-6 (enam) elemen tersebut yang diilustrasikan dalam bentuk matrik dalam lampiran 1.

Sesuai Surat BPKP RI Nomor LQA-164/D202/1/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Inspektorat Utama meraih level 3 dengan catatan. Dengan didapatkannya level 3 kapabilitas APIP di Inspektorat Utama, maka target kinerja dari indikator kinerja tingkat kapabilitas APIP level 3 telah tercapai.

Hasil penilaian pada tahun 2019, nilai kapabilitas APIP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji dalam Tabel 8.

Tabel 8.
Persandingan Nilai Kapabilitas APIP
Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2019

No.	Elemen	Tahun 2016					Tahun 2017					2019				
		Pemenuhan Pernyataan			Jml	Level	Pemenuhan Pernyataan			Jml	Level	Pemenuhan Pernyataan			Jml	Level
		Ya	Sebagian	Tidak			Ya	Sebagian	Tidak			Ya	Sebagian	Tidak		
1.	Peran dan Layanan	7	2		9	1	9			9	2	5	5		10	2
2.	Pengelola Sumber Daya Manusia	10	2		12	1	12			12	2	18	2		20	2
3.	Praktik Profesional	6	6	1	13	1	13			13	2	8	9		17	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10			10	2	10			10	2	19			19	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	6			6	2	6			6	2	14			14	3
6.	Struktur Tata Kelola	8			8	2	8			8	2	13			13	3
		47	10	1	58		58			58		77	16		93	

Sumber: Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019

Hasil *assesment* BPKP Tahun 2019 dengan hasil Level 3 dengan catatan dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini:

Gambar 12 .
 Hasil Assessment BPKP Tahun 2019



Hal tersebut berarti seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) pada level 2 telah terpenuhi. Dari 14 (empat belas) KPA yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mencapai kapabilitas APiP Level 3 penuh, 8 (delapan) KPA telah terpenuhi dan 6 (enam) KPA belum terpenuhi. Dengan demikian, Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI harus menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*) agar level kapabilitas APiP berada pada “level 3 penuh”.

Sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP) 2015-2019 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025, pemerintah mengharapkan seluruh APiP telah berada pada level 3 pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 dan Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI telah berhasil mencapai target tersebut pada tahun 2019.

Keberhasilan Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI mendapatkan Level 3 kapabilitas APiP adalah dikarenakan Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI secara terus menerus dan berkelanjutan berkomunikasi dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka pemenuhan 93 pernyataan yang terbagi ke dalam 14 (empat belas) KPA dan 6 (enam) elemen.

WBS



LHKPN



LHKASN



E-Learning



Pelaporan Gratifikasi



Sasaran

3

Terwujudnya Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian
yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi

Indikator 3.2

Tingkat Maturitas SPIP

Target

Level 3

Capaian

Realisasi

Level 3

100%

Maturitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedewasaan, kematangan, yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencari tujuan. Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai:

- a. Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP;
- b. Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penilaian (*assesment*) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil Penilaian sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor LQA-163/D202/1/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (QA) atas Hasil *Self Assessment* Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas SPIP, secara umum penyelenggaraan SPIP di Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "*terdefinisi*" dengan skor akhir hasil penilaian sebesar "3,185".
2. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian (sub unsur) maturitas dikelompokkan dalam 5 unsur SPIP dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9.
 Rincian Hasil Penilaian Maturitas Unsur SPIP

No	Unsur	Bobot %	Assesment		Quality Assurance (QA)	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	3,500	1,050	3,375	1,013
2.	Penilaian Risiko	20	4,000	0,800	3,000	0,600
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	3,182	0,795	0,795	0,773
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	3,500	0,350	0,350	0,350
5.	Unsur Pemantauan	15	4,000	0,600	0,600	0,450
Jumlah Skor		100		3,595		3,185

Sumber: Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019

Pencapaian Setjen dan BK DPR RI pada level **"terdefinisi"** dengan karakteristik yaitu Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Adapun dari hasil pelaksanaan *Quality Assurance (QA)* penilaian tingkat maturitas SPIP, masih terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas penerapan kebijakan dan SOP tentang pelaksanaan Tusi APIP dan belum didukung dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut;
2. Atas penerapan manajemen risiko, belum dilakukan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan tersebut (baik atas peraturan maupun *risk register*) secara berkala;
3. Belum semua satuan kerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selesai melaksanakan *updating risk register* (RR) dan rencana pengelolaan risiko (RPR);
4. Atas penerapan manajemen risiko, belum dilakukan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan tersebut (baik atas peraturan maupun dokumen rencana pengelolaan risiko) secara berkala;
5. Evaluasi telah dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja dibandingkan targetnya, namun belum dilakukan evaluasi terhadap implementasi SOP/kebijakan terkait reviu kinerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI secara berkala serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut;

6. Belum terdapat dokumentasi yang memadai atas pelaksanaan evaluasi berkala untuk menilai efektifitas pelaksanaan kebijakan/SOP terkait pemantauan berkelanjutan seperti surat tugas/nodin dan pelaporan evaluasi SOP/kebijakan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut;
7. Belum terdapat dokumentasi yang memadai atas pelaksanaan evaluasi berkala untuk menilai efektifitas pelaksanaan kebijakan/SOP terkait evaluasi terpisah serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

Pada tahun 2019, hasil penilaian tingkat maturitas SPIP mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel 10.

Tabel 10.
Perbandingan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Nilai	
			2018	2019
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	0,750	1,013
2.	Penilaian Risiko	20	0,200	0,600
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	0,568	0,773
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	0,200	0,350
5.	Unsur Pemantauan	15	0,300	0,450
		100	2,018	3,185

Sumber: Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019

Pada tahun 2018, hasil penilaian tingkat maturitas SPIP mendapatkan nilai 2,018 dan masuk ke dalam level 2 atau “berkembang” dimana karakteristik SPIP nya adalah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten, menjadi level 3 dengan nilai 3,185 atau “terdefinisi” dengan karakteristik SPIP-nya setelah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan diperolehnya hasil penilaian tingkat maturitas SPIP mendapatkan nilai 3,185, maka nilai maturitas SPIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah mencapai level 3 dan

memenuhi target RPJMN 2015-2019 pada indikator kinerja bidang aparatur negara tahun 2019.

Tabel 11.
 Matriks Perbandingan Target Maturitas SPIP
 Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

No	K/L/D	Target Maturitas SPIP Level 3*		
		2017	2018	2019
1	Kementerian/Lembaga	32%/28	55%/42	85%/75
2	Provinsi	30%/10	74%/25	85%/29
3	Kabupaten/Kota	20%/102	51%/260	70%/356

* Target 2017 sesuai Tapkin BPKP

Target 2018 dan 2019 sesuai PP Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP 2018

Sumber: Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mencapai target level 3 maturitas SPIP adalah berkat komitmen dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif melalui penilaian mandiri maturitas SPIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hal ini sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor IU/178/ST.N-PKPT/IRTAMA/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2019 Nomor IU/588.A/SETJEN dan BK DPR RI/IU.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai level 3 maturitas SPIP adalah dengan melakukan kegiatan *self assessment* oleh Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI yaitu:

1. Bimbingan teknik penyusunan risk register yang dilakukan oleh BPKP;
2. Melaksanakan survei persepsi maturitas;
3. Pengisian kertas kerja dan eviden SPIP;
4. Wawancara pimpinan dan pegawai di Setjen dan BK DPR RI



Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Sasaran

4

Meningkatnya kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator

Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Target 70% (941 pegawai)

Realisasi 53,79% (723 pegawai)

Capaian

76,9%

Dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai penyelenggaraan manajemen karir bagi PNS bertujuan salah satunya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui diklat dan kegiatan pengembangan lainnya. Hal ini menjadi strategi organisasi agar PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan.

Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI turut serta dalam proses peningkatan kualitas pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini dilaksanakan sesuai dengan Standar

Kompetensi masing-masing jabatan dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Adapun pengembangan SDM yang diselenggarakan Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI melalui:

1. Pelatihan Kepemimpinan bagi Pelatihan Kepemimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator, dan Pengawas;
2. Pelatihan Fungsional, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing;
3. Pelatihan Dasar CPNS, yaitu pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
4. Pelatihan/Bimtek/Workshop/Seminar atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI;
5. Pelatihan/Bimtek/Workshop/Seminar atau sejenisnya yang diikutsertakan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya;
6. Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. Pemberian Pelatihan Teknis ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yang diantaranya meliputi:
 - a. Swakelola;
 - b. Bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan
 - c. Kontraktual dengan pihak swasta.

Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI mendukung penuh kualitas pengembangan SDM demi kepentingan organisasi. Terlihat pada tahun 2019 ini semakin banyak PNS yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini diharapkan kualitas pengembangan SDM akan makin meningkat dan target PNS dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan bisa tercapai.

Target IKU berdasarkan Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI pada tahun 2019 untuk pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2019 adalah sebesar 70% dari total seluruh pegawai yaitu 941 pegawai. Dari rekapitulasi jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 tercatat ada 723 pegawai yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga dapat kami sampaikan penghitungan persentase pencapaian pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di tahun ini, yaitu:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

maka:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{723}{941} \times 100\% = 76,83\%$$

Dari penghitungan tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar **76,8%**

Dalam Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan". Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Realisasi target untuk indikator "Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan" belum mencapai target hanya diukur berdasarkan data pegawai Setjen dan BK DPR RI yang telah mendapatkan diklat klasikal. Kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal yang diselenggarakan oleh unit kerja di luar Pusdiklat belum terkordinasikan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sehingga belum tercatat sebagai kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Beberapa pelatihan non klasikal yang telah dilaksanakan oleh unit di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang belum dikordinasikan dengan Pusdiklat, antara lain:

1. Seminar nasional secara periodik mengenai berbagai topik baik di bidang ekonomi, hukum, dan legislasi, yang melibatkan pegawai fungsional Peneliti, Perancang Undang-Undang, Analis APBN.
2. Seminar kesehatan oleh Bagian Layanan Kesehatan.
3. Kegiatan pelatihan, bimtek oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi.
4. Berbagai kegiatan *Benchmarking* ke dalam dan luar negeri mengenai berbagai hal antara lain pengembangan kompetensi SDM, Anggaran dan Manajemen SDM, manajemen persidangan, dan lain-lain.

Kendala yang dihadapi Pusat Pendidikan dan Pelatihan selama pendidikan dan pelatihan, adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana karena fasilitas yang dimiliki pusdiklat saat ini belum secara utuh memenuhi karakteristik sebuah lembaga pendidikan. Masih

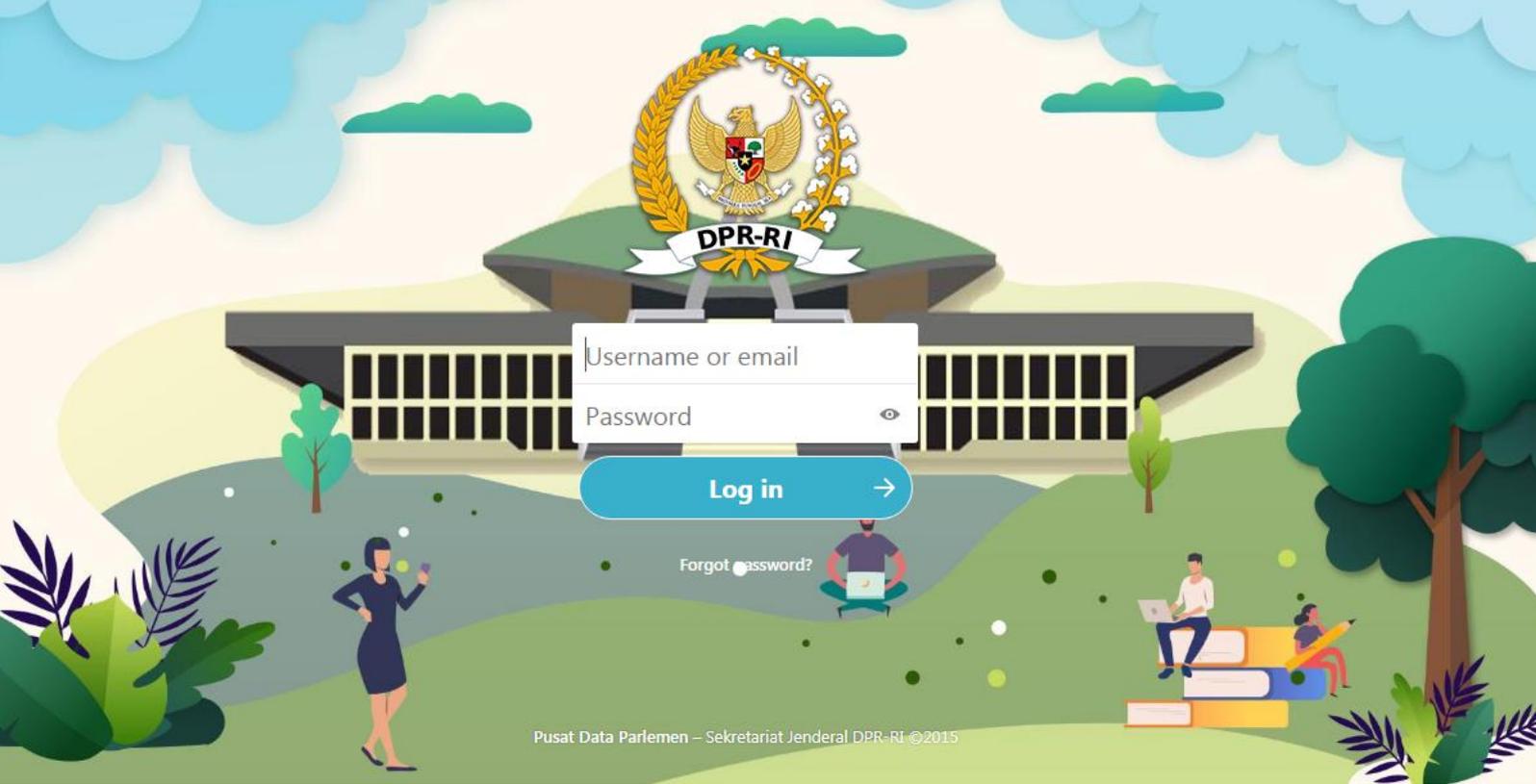
terbatasnya ruang pelatihan, asrama dan beberapa fasilitas lainnya menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan.

2. Belum seluruh pegawai menggunakan haknya untuk mengembangkan kompetensinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yaitu bahwa setiap PNS mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya selama 20 JP atau setara dengan mengikuti pelatihan selama 3 hari. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 merupakan masa transisi berakhirnya DPR RI Periode 2014-2019 dan awal masa bhakti DPR periode 2019-2024 sehingga banyak pegawai yang harus secara intensif melaksanakan tugas pokok jabatannya dalam melayani Anggota DPR dalam masa transisi dan pada akhirnya tidak dapat mengikuti pelatihan yang sudah dijadwalkan.
3. Pusdiklat belum dapat menyelenggarakan beberapa pelatihan teknis dan fungsional karena belum memiliki anggaran pola PNBP.
4. Pengembangan kompetensi pegawai secara klasikal dan non klasikal yang dilakukan oleh unit kerja diluar pusdiklat belum terkoordinasi dengan baik.

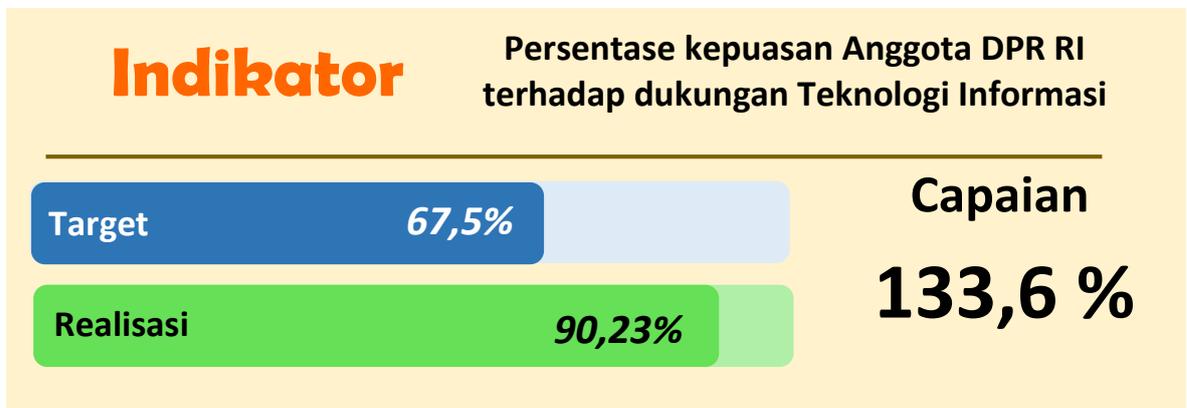
Gambar 13.

Foto Pelaksanaan Diklat Tahun 2019



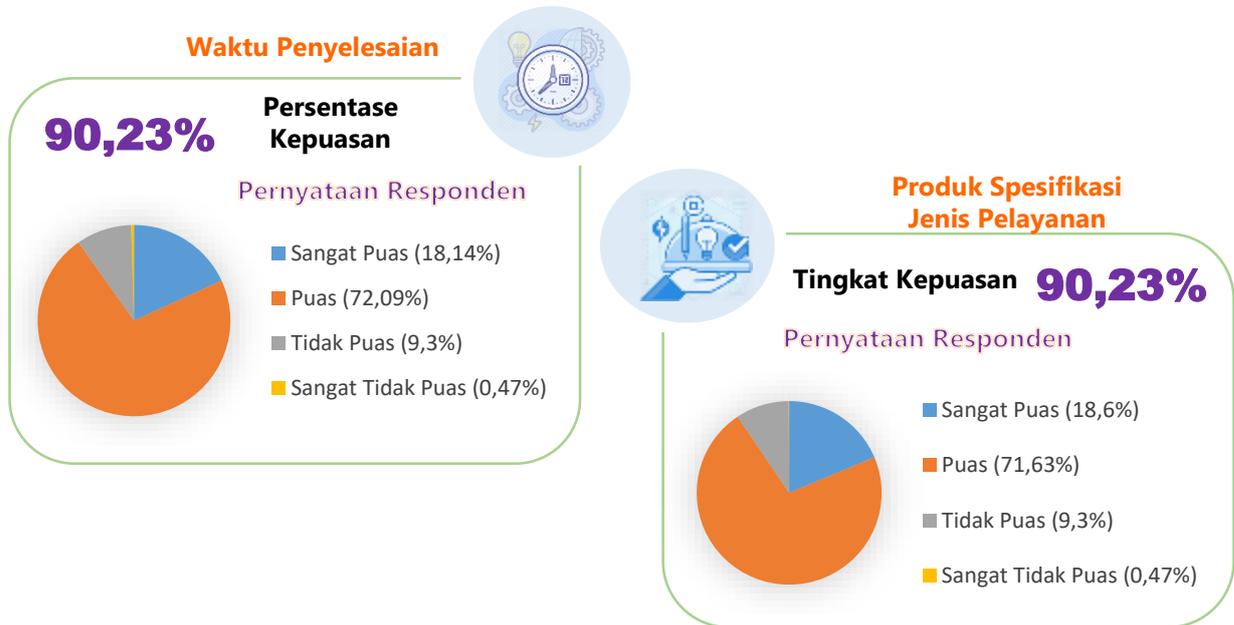


Sasaran **5** *Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi*



Indikator “Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Teknologi Informasi” digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan informasi dan teknologi. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota ini adalah metode survei sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terkait dengan layanan teknologi dan informasi yang secara spesifik dilihat dari persentase kepuasan Anggota DPR RI yang terkait dengan unsur sebagai berikut :



Secara keseluruhan persentase kepuasan Anggota DPR RI atas waktu penyelesaian dan produk spesifik jenis layanan bila digabungkan dari responden yang menjawab sangat puas dan puas, terutama yang terkait dengan layanan teknologi dan informasi sebagaimana tergambar dalam Tabel 12.

Tabel 12.
Persentase Kepuasan Pengguna
Terhadap Dukungan Teknologi Informasi

No	Unsur Survei Kepuasan	Tingkat Kepuasan
1.	Waktu Penyelesaian	90,23%
2.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,23%
Persentase kepuasan pengguna		90,23%

Layanan teknologi informasi yang tersedia di lingkungan Setjen dan BK DPR RI meliputi layanan jaringan internet, website, dan aplikasi mobile yang dapat diakses secara online dalam rangka mewujudkan parlemen modern dengan membuka akses informasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Layanan teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat diakses dengan akun khusus Anggota Dewan, antara lain Layanan Internet, Email DPR, Cloud DPR, dan Blog Anggota. Kanal akses terhadap informasi diberikan melalui layanan teknologi informasi yang berupa website atau aplikasi yang dapat diakses oleh Anggota Dewan dan

masyarakat secara daring. Layanan ini merupakan **Aplikasi Umum**, yang dapat diakses secara umum oleh **Anggota, TA/SA, Masyarakat**, antara lain:

- Website DPR
- SIPERPUS
- SiAR
- SILEG
- Website BKSAP Diplomasi Parlemen
- Website Pusat PUU
- Website Pusat Panlak UU
- Website Pusat Kajian AKN
- Website Pusat Kajian Anggaran
- Website Pusat Penelitian

Untuk mendukung mobilitas Anggota DPR yang dinamis melalui trend penggunaan aplikasi *smartphone*, DPR RI hadir dalam wujud aplikasi *Mobile DPR RI* pada *Android* dan *IOS* yang dapat diakses setiap saat.

Aplikasi Mobile:

- Mobile DPR
- DPR Now
- DPR e-Library
- Cloud DPR



Gambar 14.
Aplikasi
Mobile

Sebagai supporting system dewan, Setjen dan BK DPR RI juga melakukan pengamanan *website* dengan *SSL*, pemeliharaan keamanan server dengan *subscription firewall*, *subscription server virtualisasi*, pengembangan kabel *UTP*, jaringan *FO*, *switch access*, dan *access point* untuk ruang Pimpinan di Gedung Nusantara dan Gedung Setjen. Pembelian *Firewall Palo Alto*, berguna dalam mengelola keamanan data dan informasi pengguna dalam skala besar, dan mampu mengintegrasikan arus lalu lintas dan data jaringan pada arsitektur jaringan yang telah ada. Sistem ini berbasiskan kontroler untuk keamanan data dan informasi bagi pengguna internet. Hal ini diperlukan karena pertumbuhan pengguna internet di lingkungan Setjen dan BK DPR telah mencapai 10.000 pengguna.

Pada tahun 2019, Setjen dan BK DPR RI melakukan pembangunan/pengembangan terhadap beberapa aplikasi sebagaimana terdapat dalam Tabel 13.

Tabel 13.

Daftar Aplikasi/Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan pada Tahun 2019

No	Aplikasi	Keterangan
1	Sitanang	Integrasi data dengan ppnpn online

No	Aplikasi	Keterangan
2	PPNPN Online (TS/SA)	Integrasi dengan SMS Gateway dan Email untuk verifikasi PIN registrasi
3	Pengaduan Masyarakat	Redesign
4	Cloud DPR	Fitur OnlyOffice untuk fungsi kolaborasi dan fitur email sharing
5	SILEG	Redesign
6	SIAR	Integrasi dengan database AKD dan PPID
7	BDTI Service Desk	Aplikasi ticketing helpdesk internet
8	Cetak Amplop	Aplikasi otomasi pencetakan amplop pada Bagian Persuratan
9	BKSAP Website Diplomasi Parlemen	Portal informasi kegiatan BKSAP
10	TNDE	Aplikasi untuk e-Disposisi dan tanda tangan digital

Adapun daftar rinci seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang telah menerapkan pembangunan aplikasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi, terlampir dalam Lampiran 2.

Setjen dan BK DPR RI juga telah menerapkan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (**SPBE**) dengan serangkaian proses untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan yang berkualitas. Layanan **SPBE** merupakan integrasi dari beberapa fungsi aplikasi yang memiliki nilai manfaat. Hal ini dilakukan karena di lingkungan Setjen dan BK DPR RI masih terdapat aplikasi yang masih perlu dilakukan penataan sehingga tata kelola administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih efektif. Meskipun SPBE ini telah diterapkan sejak tahun 2018, namun hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB mencapai indeks 1,6. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan pembaruan *Grand Design* pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih sedang berjalan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pusat Data dan Informasi telah berupaya mempercepat tata kelola SPBE yaitu dengan menyusun Konsep Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen dan BK DPR RI tahun 2020-2024 sebagai *Road Map* rencana pengembangan TIK Setjen dan BK DPR RI jangka menengah yang menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan di bidang TIK. Kegiatan ini menghasilkan skema rancangan RITIK Setjen dan BK DPR RI serta konsep *grand desain* pengembangan TIK secara rinci beserta *Road Map* pembangunan dan kebutuhan anggaran TIK yang diperlukan sampai dengan implementasi.



-  PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
-  PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
-  PUSAT KAJIAN ANGGARAN
-  PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
-  PUSAT PENELITIAN



Sasaran

6

Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal

Indikator

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Badan Keahlian

Target

67,5

Realisasi

80,23

Capaian

118,8 %

Indikator "Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Badan Keahlian" digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI. Badan Keahlian bertugas memberikan dukungan keahlian kepada anggota dewan terutama dalam melaksanakan tiga fungsi kedewanan yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Berdasarkan sembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, unsur "Persyaratan", "Biaya/Tarif", dan "Sarana dan Prasarana" tidak sesuai dengan layanan yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI, sehingga unsur ini tidak digunakan.

Hasil pengukuran unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam kuesioner yaitu sebagai berikut:

Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPR RI
Terhadap Dukungan Badan Keahlian
DPR RI

INDEKS KOMPOSIT

80,23

Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan keahlian di atas dihasilkan dari penilaian unsur survei kepuasan sebagai berikut:



Indeks Kepuasan

79,48

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Survei terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur dilakukan dengan menilai :

- Dukungan Badan Keahlian DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja.
- Kemudahan mendapatkan layanan dukungan keahlian yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI.



Indeks Kepuasan

79,65

Waktu Penyelesaian

Survei terhadap waktu penyelesaian dilakukan dengan menilai kecepatan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.



Indeks Kepuasan

79,53

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Survei terhadap produk dan dukungan BK DPR RI dilakukan dengan menilai kualitas produk dan dukungan yang dihasilkan oleh Badan Keahlian DPR RI serta kesesuaiannya dengan kebutuhan Anggota DPR RI.

Produk yang dihasilkan antara lain Info Singkat, Jurnal Ilmiah, buku, Naskah Akademik RUU, Buletin APBN, Keterangan DPR di MK, Telaah Hapssem BPK.



Indeks Kepuasan

82,15

Kompetensi dan Perilaku SDM

Survei terhadap kompetensi dan perilaku SDM dilakukan dengan menilai:

- Kualitas SDM Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.
- Keramahan dan kesopanan SDM Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI.



Indeks Kepuasan

79,88

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Survei dilakukan dengan menilai kecepatan Badan Keahlian DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPR RI terhadap produk dan dukungan keahlian yang diberikan.

Target Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan Badan Keahlian DPR RI di tahun 2019 adalah 67,5 dan realisasinya mencapai 80,23. Hal ini tentunya merupakan capaian yang sangat memuaskan, dimana realisasinya mencapai 118,8%. Indeks komposit kepuasan anggota terhadap kualitas pelayanan dan keahlian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yakni 80,04. Perbandingan indeks masing-masing unsur dan indeks komposit dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14.
Perbandingan Unsur Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017- 2019

No	Unsur Survei Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan		
		2017	2018	2019
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	73,14	79,77	79,48
2.	Waktu Pelayanan	75,77	78,29	79,65
3.	Produk dan Dukungan Badan Keahlian	75,27	80,43	79,53
4.	Kompetensi dan Perilaku SDM	71,16	81,20	82,15
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	73,68	79,28	79,88
Indeks Komposit		74,22	80,04	80,23

Sumber: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata indeks unsur survei kepuasan mengalami peningkatan, kecuali unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta unsur Produk dan Dukungan Badan Keahlian yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018, namun secara gabungan (indeks komposit) nilainya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Badan Keahlian memberikan dukungan dalam bentuk keahlian yang diberikan dalam bentuk pendampingan/memberikan masukan langsung maupun tertulis. Diantara jenis-jenis produk resmi Badan Keahlian yang dipublikasikan baik secara fisik maupun online untuk anggota dewan dapat digolongkan ke dalam:

1. Naskah Akademik
2. Keterangan DPR RI dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945
3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk Jurnal, Buku, dan Proceeding
4. Review
5. Policy Briefe
6. Review
7. Telaah Hapsem BPK
8. Buletin APBN
9. Laporan Penelitian

Target, realisasi, serta capaian kinerja kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Badan Keahlian DPR RI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi indikator kinerja ini mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,25%, begitu juga dengan capaian kinerja mencapai 123%. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat terlihat dalam Tabel 15.

Tabel 15.
Perbandingan Capaian Kinerja Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Target	62,5	65	67,5
Realisasi	74,22	80,04	80,23
Capaian	118,75%	123%	118,8%

Sumber: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2019

Gambar 15.
Produk Layanan Keahlian



3.2. Akuntabilitas Keuangan

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pagu Anggaran DPR RI yang dikelola Sekjen DPR RI pada tahun 2019 dan persandingannya dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 16.

Tabel 16.
Persandingan Pagu Anggaran DPR RI Tahun 2018 dan 2019

No.	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	
		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Satker Dewan	4.027.859.124.000	3.809.031.373.000
2.	Satker Setjen	1.700.427.543.000	1.930.278.774.000
Jumlah		5.728.286.667.000	5.739.310.147.000

Sumber: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2020

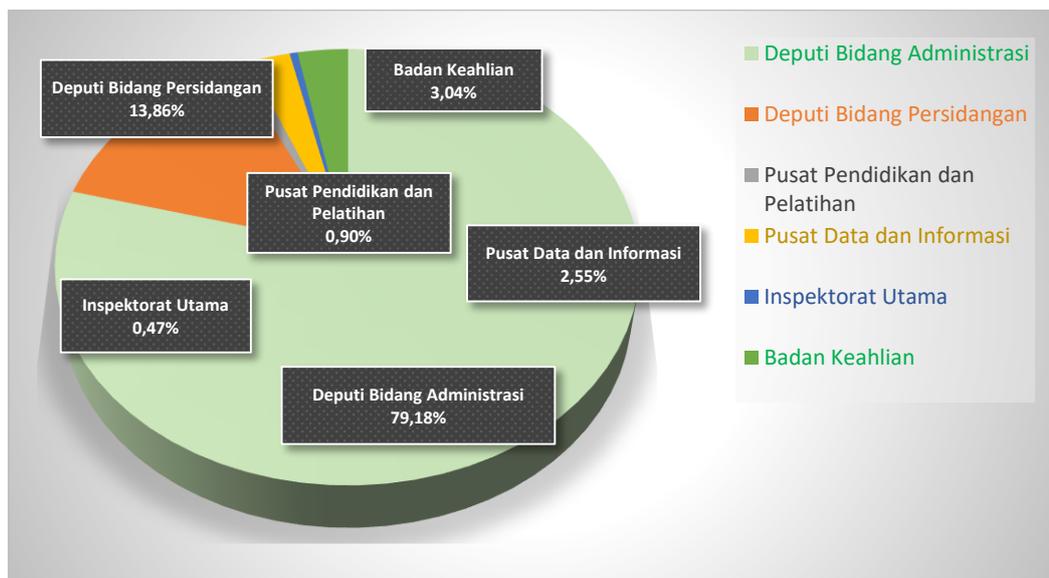
Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 31 Ayat (1) huruf j disebutkan bahwa "Pimpinan DPR menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR". Implementasi atas pasal tersebut dijabarkan dalam pasal lain pada peraturan yang sama, dimana penyusunan rencana kerja dan anggaran DPR dilakukan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran Satker Setjen, Sekretaris Jenderal telah memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan kepada 2 (dua) Deputi, 1 (satu) Inspektur Utama, 1 (satu) Kepala Badan Keahlian, dan 2 (dua) Kepala Pusat yang berada langsung dibawah Sekretaris Jenderal. Pembagian kewenangan pelaksanaan anggaran Satker Setjen pada tahun 2019, dapat terlihat dalam Tabel 17 dan Gambar 16.

Tabel 17.
 Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2019

No	Deputi / Pusat	Pagu Anggaran	% Pagu
1.	Deputi Bidang Administrasi	1.611.537.645.000	79,18%
2.	Deputi Bidang Persidangan	212.260.103.000	13,86%
3.	Badan Keahlian	46.603.209.000	3,04%
4.	Pusat Data dan Informasi	38.972.543.000	2,55%
5.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	13.716.945.000	0,90%
6.	Inspektorat Utama	7.188.329.000	0,47%

Gambar 16.
 Prosentase Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen
 Tahun 2019



Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019, masih terdapat anggaran Satker Setjen yang diblokir oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp. 399.539.922.000,00 yang terdiri atas anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.537.600.000,00, belanja barang sebesar Rp. 535.329.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 397.466.993.000,00. Anggaran yang di blokir tersebut tetap masuk dalam perhitungan pagu DPR RI namun tidak diperhitungkan dalam penetapan *reward* dan *punishment* anggaran serta tidak diperhitungkan dalam penghitungan kinerja anggaran DPR RI. Oleh karena itu, dalam perhitungan kinerja Anggaran DPR RI serta dalam Laporan Kinerja Sekretaris Jenderal DPR

RI, pagu DIPA Satker Setjen sudah dikurangkan dengan pagu yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Dari Pagu Anggaran DPR RI pada tahun 2019 sebesar Rp.5.739.310.147.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.4.786.393.290.917,00 atau 83,40% dari pagu. Besaran realisasi anggaran tersebut berasal dari realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan.

Pagu yang dikelola Satker Dewan sebesar Rp.3.809.031.373.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.3.365.141.938.504,00 atau 88,35% dari pagu. Sedangkan Pagu yang dikelola Satker Setjen sebesar Rp.1.930.278.774.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.1.421.251.352.413,00 atau 73,63% dari pagu. Jika tidak memperhitungkan blokir anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 399.539.922.000,00 maka persentase realisasi anggaran Satker Setjen mencapai 92,85%. Sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi anggaran satker Setjen tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,97%.

Setjen dan BK DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Bahkan, di tahun 2019 ini untuk pertama kalinya kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan berkesinambungan atas mekanisme/proses kerja, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan, dilakukan evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran sehingga responsif atas berbagai permasalahan yang timbul. Apabila ada unit kerja yang kurang optimal dalam merealisasikan anggarannya, maka dapat segera dilakukan revisi anggaran ke unit kerja yang membutuhkan tambahan anggaran. Pada Tabel 18 digambarkan persandingan realisasi anggaran Satker Setjen Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Tabel 18.

Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2016 - 2019

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	1.289.948.353.000	945.726.300.036	73,32 %
	1.202.932.377.000 (Tanpa Blokir Anggaran)	945.726.300.036	78,62 %
2017	1.139.710.426.000	1.004.887.639.067	88,17 %
2018	1.700.427.543.000	1.091.888.983.985	64,21 %
	1.214.875.122.000	1.091.888.983.985	89,88 %

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	(Tanpa Blokir Anggaran)		
2019	1.930.278.774.000	1.421.251.352.413	73,63 %
	1.530.738.852.000 (Tanpa Blokir Anggaran)	1.421.251.352.413	92,85 %

Sumber : Bagian Perencanaan, Januari 2020

Anggaran DPR RI Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan anggaran di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI sebesar 27,52%. Namun, Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan justru mengalami penurunan sebesar 8,80%. Peningkatan anggaran di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI sebagian besar untuk membiayai kegiatan yang sifatnya lima tahunan (pasca pemilu) seperti perbaikan ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPR RI, pembuatan ruang kerja dan rumah jabatan untuk penambahan 15 Anggota DPR RI yang baru, serta sarana kerja pendukung lainnya.

Kinerja yang mengagumkan ditunjukkan oleh bagaimana unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI merealisasikan anggarannya. Kenaikan realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan kenaikan pagu anggarannya. Realisasi anggaran mengalami peningkatan 30,16%, lebih besar dibandingkan kenaikan pagu anggaran yang mencapai 26%. Tabel 19 menggambarkan persandingan capaian realisasi anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tabel 19.
Persandingan Realisasi Anggaran
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun	Kode	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI	1.163.803.671.000	1.043.841.898.612	89,69
	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51.101.451.000	48.047.085.373	94,02

Tahun	Kode	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	TOTAL		1.214.875.122.000	1.091.888.983.985	89,88
2019	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI	1.484.135.643.000	1.375.890.490.359	92,71
	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	46.603.209.000	45.360.862.054	97,33
	TOTAL		1.530.738.852.000	1.421.251.352.413	92,85

Persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Inspektorat Utama dan yang terendah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Apabila disandingkan dengan realisasi anggaran Satker Setjen yang mencapai 92,85%, maka ada 3 (tiga) unit kerja yang kinerjanya di atas rata-rata yaitu Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian. Hal ini dapat terlihat dalam Tabel 20.

Tabel 20.
Capaian Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian

No	Unit Kerja	Pagu	% Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Deputi Bidang Administrasi	1.212.091.873.000	79,18%	1.137.622.468.300	93,86%
2.	Deputi Bidang Persidangan	212.165.953.000	13,86%	186.087.843.273	87,71%
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	13.716.945.000	0,90%	11.663.372.838	85,03%
4.	Pusat Data dan Informasi	38.972.543.000	2,55%	33.494.523.048	85,94%
5.	Inspektorat Utama	7.188.329.000	0,47%	7.022.282.900	97,69%
6.	Badan Keahlian	46.603.209.000	3,04%	45.360.862.054	97,33%
	Total	1.530.738.852.000	100%	1.421.251.352.413	92,85%

Meskipun realisasi anggaran tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, namun masih terdapat beberapa kendala dalam merealisasikan anggaran, yaitu:

1. **Kontrak kerja sebagian besar dilaksanakan di triwulan IV**
 Hingga triwulan III, realisasi anggaran baru mencapai 52,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 40% realisasi anggaran baru dilaksanakan di triwulan IV. Apabila terdapat kegiatan yang masih terdapat sisa anggaran setelah suatu pekerjaan selesai atau terjadi gagal lelang, maka sulit untuk dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya.

2. **Kegiatan Pemilihan Umum**
 Terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan di bulan April dengan pelantikan Anggota DPR RI di bulan Oktober. Beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Anggota DPR RI tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena Anggota DPR RI sibuk memantau hasil Pemilu di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

3. **Rekrutmen CPNS**
 Tahun 2019 tidak ada rekrutmen CPNS karena pemerintah baru mengeluarkan kebijakan terkait rekrutmen/penerimaan CPNS di akhir tahun sehingga Setjen dan BK DPR RI baru dapat melaksanakan kegiatan terkait rekrutmen CPNS di tahun 2020 meskipun pembukaan sudah dilakukan di tahun 2019.

B. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2019, Setjen dan BK DPR RI memperoleh skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,41, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 85,48. Terdapat 12 indikator sebagai parameter dalam penghitungan nilai tersebut. Adapun sandingan kinerja tahun 2019 dan 2018 tercermin dalam Tabel 21.

Tabel 21.
Persandingan Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Bobot
1.	UP/TP	99	99	10
2.	Data Kontrak	84	91	15
3.	Kesalahan SPM	97,75	90	6

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Bobot
4.	Retur SP2D	99,84	99,83	6
5.	Hal III DIPA	87,19	83,44	5
6.	Revisi DIPA	100	88,89	5
7.	Penyelesaian tagihan	81,59	92,06	15
8.	Rekon LPJ	91,67	100	5
9.	Renkas	95,35	99,71	5
10.	Realisasi	89,30	91,28	20
11.	Pagu Minus	99,83	99,98	4
12.	Dispensasi SPM	100	95	4
Total		85,48	93,41	100

Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Februari 2020

Berdasarkan data tersebut, terdapat empat indikator yang memiliki nilai pengungkit yang cukup besar, yaitu UP/TP (Uang Persediaan), Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, dan Realisasi. Setjen dan BK DPR RI dapat berfokus untuk melakukan perbaikan di keempat aspek tersebut tanpa mengabaikan aspek lainnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Program

Menggunakan kriteria yang ada pada PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran, dengan memperhitungkan 2 (dua) aspek kinerja, yaitu:

- a. Aspek Implementasi, akan menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran yang mengukur (bobot 33,3%)
 - 1) Penyerapan Anggaran untuk menilai seberapa besar anggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan.
 - 2) Konsistensi Rencana Penarikan Dana mengukur konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan.
 - 3) Capaian Indikator Keluaran mengukur produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Capaian Keluaran (Output) Program diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Program dengan target Indikator Keluaran (Output) Program. Capaian Keluaran (Output) Kegiatan diukur dengan

membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

- 4) Efisiensi, mengukur efisiensi pemanfaatan sumber dana (anggaran) dalam menghasilkan suatu produk barang/jasa. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan elisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- b. Aspek Manfaat, akan menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Pada evaluasi ini, diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Sasaran Program dengan target Indikator Sasaran Program (bobot 66,67%).

Berdasarkan hasil pengukuran mandiri yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat dijelaskan bahwa nilai kinerja untuk aspek implementasi adalah 93,60 % (berada dalam kategori sangat baik) dan nilai kinerja untuk aspek manfaat adalah 100% (berada dalam ketagori sangat baik). Sehingga nilai kerja anggaran untuk Satker Setjen dan pada Program yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal DPR RI secara keseluruhan adalah sebesar 97,87% (berada dalam kategori sangat baik). Rincian perolehan nilai untuk masing-masing aspek tergambar dalam Tabel 22.

Tabel 22.
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

No	Unsur	Nilai	Bobot	Skor
1.	Aspek Implementasi	93,60 %	33,33 %	31,20%
2.	Aspek Manfaat	100,00 %	66,66 %	66,67 %
Nilai Kinerja Anggaran				97,87%

Meskipun nilai kinerja anggaran sudah dalam kategori sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, antara lain:

1. Meningkatkan nilai aspek implementasi melalui optimalisasi serapan anggaran, penyempurnaan proses penyusunan rencana penarikan, penyempurnaan penyusunan target kinerja dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.
2. Mempertahankan pencapaian aspek manfaat dengan melakukan penyempurnaan nomenklatur IKU, Target IKU dan metode pengukuran atas

IKU yang ditetapkan.

Tingginya pencapaian aspek manfaat menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Sekretariat Jenderal DPR RI. Rincian Realisasi Anggaran Per Unit Kerja dan Kaitannya dengan sasaran dan IKU tergambar dalam Tabel 23.

Tabel 23.
Rincian Realisasi Anggaran per Unit Kerja
dan Kaitannya dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Unit Kerja	Pagu Bisa Direalisasikan	Realisasi	%	Mendukung IKU
1.	Deputi Bidang Administrasi	1.212.091.873.000	1.137.622.468.300	93,86%	
	1.1. Biro Perencanaan dan Keuangan	251.948.689.000	248.246.441.872	98,53%	Mendukung Sasaran 1
	1.2. Biro Kepegawaian dan Organisasi	36.421.903.000	29.062.756.301	79,79%	Mendukung Sasaran 2
	1.3. Biro Umum	260.551.782.000	234.186.090.856	89,88%	Mendukung Sasaran 1
	1.4. Biro Protokol	19.148.709.000	16.291.728.620	85,08%	Mendukung Sasaran 1
	1.5. Biro Pengelolaan BMN	640.598.587.000	607.443.335.851	94,82%	Mendukung Sasaran 1
	1.6. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3.422.203.000	2.392.114.800	69,90%	Mendukung Sasaran 1
2.	Deputi Bidang Persidangan	212.165.953.000	186.087.843.273	87,71%	
	1.1. Biro Persidangan I	8.777.133.000	7.692.469.186	87,64%	Mendukung Sasaran 1
	1.2. Biro Persidangan II	2.290.049.000	1.761.244.300	76,91%	Mendukung Sasaran 1
	1.3. Biro Kerjasama Atar Parlemen	4.396.680.000	3.767.280.400	85,68%	Mendukung Sasaran 1
	1.4. Biro Kesekretariatan Pimpinan	8.566.095.000	7.521.658.432	87,81%	Mendukung Sasaran 1
	1.5. Biro Pemberitaan Parlemen	188.135.996.000	165.345.190.955	87,89%	Mendukung Sasaran 1
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	13.716.945.000	11.663.372.838	85,03%	Mendukung Sasaran 4
4.	Pusat Data dan Informasi	38.972.543.000	33.494.523.048	85,94%	Mendukung Sasaran 5
5.	Inspektorat Utama	7.188.329.000	7.022.282.900	97,69%	Mendukung Sasaran 3, Indikator 3.1 dan 3.2
6.	Badan Keahlian	46.603.209.000	45.360.862.054	97,33%	Mendukung Sasaran 6
	1.1. Anggaran TU Badan Keahlian	8.555.439.000	8.451.199.057	98,78%	Mendukung Sasaran 6
	1.2. Pusat Perancangan UU	10.247.263.000	10.050.108.900	98,08%	Mendukung Sasaran 6
	1.3. Pusat Pemantauan	4.852.067.000	4.733.686.471	97,56%	Mendukung Sasaran 6

No	Unit Kerja	Pagu Bisa Direalisasi	Realisasi	%	Mendukung IKU
	Pelaksanaan UU				
	1.4. Pusat Kajian Anggaran	5.258.830.000	5.224.745.550	99,35%	Mendukung Sasaran 6
	1.5. Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara	3.033.333.000	2.997.039.100	98,80%	Mendukung Sasaran 6
	1.6. Pusat Penelitian	14.656.277.000	13.904.082.976	94,87%	Mendukung Sasaran 6
	Total	1.530.738.852.000	1.421.251.352.413	92,85%	

4

Penutup

Kesimpulan
Rekomendasi



Bab IV

Penutup

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2019 Setjen dan BK DPR RI melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Secara umum kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Target Kinerja Tahun 2019 ada 6 Sasaran yang terbagi dalam 7 indikator. Dari 7 indikator tersebut, masih terdapat 2 indikator yang belum dapat disampaikan capaian kinerjanya yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi dan Meningkatnya Kualitas Peningkatan SDM". Terkait indikator "Indeks Nilai Reformasi Birokrasi", hal ini dikarenakan pengukuran indikator tersebut berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang pada saat penyusunan laporan ini belum diterima oleh Setjen dan BK DPR RI. Dan terkait dengan indikator "Meningkatnya Kualitas Peningkatan SDM", hal ini disebabkan ada perubahan IKU Pusdiklat di pertengahan tahun, keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, pengembangan pelatihan klasikal dan non klasikal dilaksanakan oleh unit lain, dan lain sebagainya.

Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kerja Setjen dan BK DPR RI telah tercapai semua, sebagaimana terlihat dalam tabel 24.

Tabel 24.
Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persidangan kepada DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan administrasi dan persidangan	67,5	80,27	118,9 %
2.	Terwujudnya organisasi Setjen dan BK DPR RI yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	N/A	N/A
3.	Terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
		2. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	70 % (941 pegawai)	53,79 % (723 pegawai)	76,9 %
5.	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi	Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Teknologi Informasi	67,5	90,23	133,6 %
6.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan Badan Keahlian	67,5	80,23	118,8 %

4.2. Rekomendasi

Hasil capaian kinerja dari sasaran yang di tetapkan telah memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, namun untuk perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Menetapkan target kinerja pada indikator terkait pengukuran kepuasan Anggota DPR RI berdasarkan hasil penghitungan tahun sebelumnya.
2. Menetapkan indikator kinerja yang berorientasi pada *outcome*.
3. Melakukan pembaruan terhadap Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen dan BK DPR RI tahun 2020-2024 sebagai Road Map rencana pengembangan TIK Setjen dan BK DPR RI.
4. Merumuskan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan terhadap 16 pernyataan atas 6 KPA dalam 3 elemen yang memerlukan perbaikan / *Areas of Improvement* (Aol) yang telah ditetapkan untuk menuju "Level 3 Penuh" pada indikator tingkat kapabilitas APIP.
5. Meningkatkan kesesuaian proses penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP terhadap Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP pada indikator tingkat maturitas SPIP.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 ini pencapaian kinerja dalam pelaporan kinerja Seten dan BK DPR RI pada tahun 2020 dapat lebih baik lagi.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Matriks Internal Audit Capability Model (IACM)

	Peran dan Layanan	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajmen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 5 Optimizing	Audit intern diakui sebagai agen perubahan	Keterlibatan kepemimpinan dalam organisasi profesi Proyeksi Tim Kerja	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan Perencanaan strategis Audit Intern	Laporan efektifitas Audit Intern kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan berkelanjutan	Independen, kemampuan, dan kewenangan penuh aktifitas Audit Intern
Level 4 Managed	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	Audit Intern berkontribusi terhadap pengembangan manajemen Aktivitas Audit Intern mendukung organisasi profesi Perencanaan Tim Kerja	Strategi audit mempengaruhi manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan Audit Intern mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen puncak	Pengawasan Independen terhadap kegiatan Audit Intern Pimpinan Audit Intern melapor kepada pimpinan tertinggi organisasi
Level 3 Integrated	Layanan konsultasi Audit kinerja	Membangun tim dan kompetensinya Pegawai yang berkualifikasi profesional koordinasi tim	Kerangka kerja manajemen kualitas Perencanaan audit berbasis risiko	Pengukuran kinerja Informasi biaya Pelaporan manajemen Audit Intern	Koordinasi dengan Pihak Lain yang membeikan Saran dan Penjaminan Komponen Integral dalam tim manajemen	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan Audit Intern Mekanisme pendanaan
Level 2 Infrastruktur	Audit ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operasional kegiatan Audit Intern	Pengelolaan aktivitas Auditor Intern	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas majemen/peman gku kepentingan	Perencanaan kegiatan Audit Intern		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit dan reuiu terbatas dokumen dan transaksi untuk akurasi dan ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Lampiran 2

Daftar Aplikasi / Sistem Informasi di Setjen dan BK DPR (sampai Desember 2019)

No	Unit Kerja Eselon II	Aplikasi	Alamat Web
1	Biro Protokol	Rumah Aspirasi (Penyaluran Delegasi Masyarakat)	rumahaspirasi.dpr.go.id
		Sistem Informasi Protokol	protokol.dpr.go.id
		Reservasi Protokol Bandara	reservasi.dpr.go.id
2	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat + admin	pengaduan.dpr.go.id
		SMS Aspirasi	smsaspirasi.dpr.go.id
		Admin JDIIH	jdiih.dpr.go.id/admin
3	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Website Yankes + admin	yankes.dpr.go.id
		Website Panitia Seleksi + admin	pansel.dpr.go.id
		SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai)	siap.dpr.go.id
		Presensi Pegawai	absensi.dpr.go.id
		E-PPKP	ppkp.dpr.go.id
		Aplikasi Ortala	ortala.dpr.go.id
		E-Disiplin Pegawai	disiplin.dpr.go.id
		Aplikasi Buku Putih	bukuputih.dpr.go.id
SIGOTA	sigota.dpr.go.id		
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Keuangan	keuangan.dpr.go.id
		Aplikasi SAS	(Dirjen Perbendaharaan)
		Sistem Informasi Gaji Anggota Dewan (SIGAD)	sigad.dpr.go.id
		Sistem Informasi Administasi dan Pelaporan Data Pajak Penghasilan (SIALDA)	sialda.dpr.go.id
		Aplikasi Perjalanan Dinas Online Terintegrasi (ALADIN)	perjadin.dpr.go.id
		Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)	perencanaan.dpr.go.id
		Sistem Realisasi dan Monitoring Anggaran (SEMAR)	semar.dpr.go.id
		Aplikasi Matriks Tim dan RDK	tim.dpr.go.id
		Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan (SIDILA)	sidila.dpr.go.id
5	Biro Pengelolaan BMN	Sistem Informasi Perbendaharaan	
6	Biro Umum	Aplikasi Persuratan	persuratan.dpr.go.id
		Aplikasi Cetak Amplop	persuratan.dpr.go.id
		Aplikasi TNDE	tnde.dpr.go.id

No	Unit Kerja Eselon II	Aplikasi	Alamat Web
		Aplikasi Kendaraan	kendaraan.dpr.go.id
		Aplikasi Pamdal	pamdal.dpr.go.id
7	Biro Persidangan I	Admin AKD	akd.dpr.go.id
		Sistem Informasi Komisi 8 (SISKOM 8) (Aplikasi AKD)	akd.dpr.go.id
8	Biro Persidangan II	Aplikasi e-Document Rapat	rosidz.dpr.go.id
		Admin Sistem Informasi Legislasi (SILEG)	sileg.dpr.go.id
		Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (SIMFONI)	simfoni.dpr.go.id
9	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Website Diplomasi Parlemen BKSAP	ksap.dpr.go.id
		Aplikasi Minluna (Administrasi Luar Negeri)	minluna.dpr.go.id
		Statistik Data Perjalanan Dinas LN DPR (Aplikasi KSAP)	ksap.dpr.go.id/admin/kunjungan
		Website Event KSAP	
		Sistem Informasi Pemberitaan (SIMBRA) jaringan Sistem Komunikasi Ekstranet (SKIE)	Integrasi dengan Kementerian Luar Negeri
10	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Website PPNPN (TA/SAA) Online	ppnnpn.dpr.go.id
		Sistem Informasi Administrasi Dokumen Surat (SIAD) TU Sekjen	siad.dpr.go.id
		Sistem Informasi Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (SITANANG)	sitanang.dpr.go.id
11	Biro Pemberitaan Parlemen	Website DPR RI + english version	dpr.go.id
		Streaming TV Parlemen	www.dpr.go.id/streaming
		PPID + admin + mobile (uji coba)	ppid.dpr.go.id
		Admin Humas	humas.dpr.go.id
		Admin Pemberitaan	pemberitaan.dpr.go.id
		Admin Medsos	medsos.dpr.go.id
		Portal (Blog) Anggota	ppnnpn.dpr.go.id/blog
12	Inspektorat	Website Ittama	ittama.dpr.go.id
		SIRATU	siratu.dpr.go.id
		WBS + admin	wbs.dpr.go.id
		SIMAWAS (pihak ketiga)	simawas.dpr.go.id
13	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Website Pusdiklat	pusdiklat.dpr.go.id
		SIDIKLAT	sidiklat.dpr.go.id
		e-Learning Pusdiklat	elearning.dpr.go.id
14	Pusat Data dan Informasi	Portal Pegawai	portal.dpr.go.id
		Admin ADSI	adsi.dpr.go.id
		Admin Web Setjen	setjen.dpr.go.id
		SMS Gateway	sms.dpr.go.id
		Website Perpustakaan (SIPERPUS) + admin	perpustakaan.dpr.go.id
		OPAC Katalog Perpustakaan	opac.dpr.go.id
		e-Kliping + admin	kliping.dpr.go.id

No	Unit Kerja Eselon II	Aplikasi	Alamat Web
		Repositori	repositori.dpr.go.id
		e-Paper + admin	epaper.dpr.go.id
		e-Library DPR (Pihak Ketiga)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsfoundry.eperpuswl.id.dpr&hl=in
		Email DPR	mail.dpr.go.id
		Cloud DPR + mobile	cloud.dpr.go.id
		Aplikasi Mobile DPR	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dot.dpr_r i&hl=en_US
		LPSE	lpse.dpr.go.id
		e-Arsip	armus.dpr.go.id
		SI Indah (Sistem Informasi Data dan Aplikasi)	siinda.dpr.go.id
		Aplikasi BDTI Service Desk untuk Agenda dan Tiket Helpdesk	bdti.dpr.go.id
		DPR Now!	
15	Pusat Perancangan Undang-Undang	Website Pusat PUU + admin	pusatpuu.dpr.go.id
		SIMAS PUU (Didalam Website Pusat PUU)	pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu
16	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Website Puspanlak UU + admin	puspanlakuu.dpr.go.id
		SI Pengrajin UU	puspanlakuu.dpr.go.id/perkara
		SI Panlak UU	puspanlakuu.dpr.go.id/sipanlak-uu
		SIMAS Panlak UU	puspanlakuu.dpr.go.id/kuesioner
17	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Website Pusat Kajian AKN + admin	puskajiakn.dpr.go.id
18	Pusat Kajian Anggaran	Website Pusat Kajian Anggaran + admin	puskajianggaran.dpr.go.id
19	Pusat Penelitian	Website Puslit + admin	puslit.dpr.go.id
		e-Jurnal	jurnal.dpr.go.id
		SDIP	sdip.dpr.go.id
	Total ada 86 aplikasi		

Lampiran 3

Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

